



Menalar Mantra Pemberdayaan

Tri Agus Susanto*, Rema Marina, Mohamad Firdaus, Irvan Riyadi

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: tasspijar@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ulang konsep pemberdayaan yang telah mengalami pergeseran makna dari proses emansipatoris menjadi proyek teknokratis yang direduksi oleh logika modernisasi dan pembangunan. Awalnya, pemberdayaan merupakan bahasa perlawanan yang menantang struktur kuasa dan memobilisasi aksi kolektif, namun kini sering menjadi buzzword yang dipisahkan dari konteks sosial-politik lokal serta diarahkan pada target kuantitatif jangka pendek. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis literatur, studi kasus, dan kerangka teoritis seperti “rendering technical” dan “efek antipolitik”. Hasil kajian menunjukkan bahwa program-program seperti PNPM Mandiri, Dana Desa, dan proyek konservasi kerap gagal memberdayakan masyarakat karena meminggirkan pengetahuan lokal, memproduksi partisipasi semu, dan memperkuat dominasi elite. Reduksi pemberdayaan dalam kerangka modernisasi juga menciptakan ketimpangan epistemik, di mana pengetahuan ahli dianggap lebih sah dibandingkan pengetahuan komunitas. Penelitian ini merekomendasikan pemulihan dimensi politik pemberdayaan, pengakuan pengetahuan lokal, dan penguatan proses kolektif berbasis solidaritas sosial. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya menjadi jargon, tetapi kembali menjadi praktik transformatif yang membebaskan dan menegosiasi ulang relasi kuasa.

Kata kunci: Pemberdayaan, Modernisasi, Partisipasi Semu, Pengetahuan Lokal, Genealogi Pemberdayaan

ABSTRACT

This study revisits the concept of empowerment, which has shifted from an emancipatory process into a technocratic project reduced by the logic of modernization and development. Initially, empowerment served as a language of resistance, challenging power structures and mobilizing collective action. However, it has increasingly become a buzzword detached from its socio-political context and directed toward short-term, quantifiable targets. Using a qualitative, library research approach, this study analyzes literature, case studies, and theoretical frameworks such as “rendering technical” and the “anti-politics effect”. The findings reveal that programs such as the PNPM Mandiri, Village Fund initiatives, and conservation projects often fail to genuinely empower communities due to the marginalization of local knowledge, the production of tokenistic participation, and the reinforcement of elite dominance. The reduction of empowerment within the modernization framework also generates epistemic inequality, in which expert knowledge is valued over community knowledge. This study recommends restoring the political dimension of empowerment, recognizing local knowledge, and strengthening collective processes based on social solidarity. In doing so, empowerment can move beyond rhetoric to become a transformative practice that liberates and renegotiates power relations.

Keywords: Empowerment, Modernization, Tokenistic Participation, Local Knowledge, Genealogy of Empowerment

Article Information: Submitted : 2023/12/20 Revised: 2024/01/10 Accepted: 2024/01/22

PENDAHULUAN

Penelitian berbasis minat yang kami ajukan hendak meneliti tentang mengkaji ulang pemberdayaan. Pemberdayaan dapat diasumsikan sebagai upaya untuk memperbaiki suatu tatanan kehidupan. Pemberdayaan merupakan antitetis dari developmentalis. Paradigma developmentalism yang bekerja ternyata tidak membawa transformasi sosial bagi kehidupan masyarakat pada masa itu, justru kemudian memunculkan pelbagai macam permasalahan sosial yang ada. Pemberdayaan merupakan sebuah mantra yang mampu merubah kehidupan manusia. Dalam mantra-mantra tersebut terdapat banyak kosakata kunci seperti partisipasi, komunitas, otonomi, mandiri, transparansi, inklusif dan masih banyak lainnya.

Perkembangan pemberdayaan di Indonesia secara historis dapat dilihat dalam 4 fase, yaitu fase penjajahan, fase orde lama, fase orde baru, dan fase reformasi hingga sekarang. Fase penjajahan menjelaskan bahwa pemberdayaan digunakan sebagai alat perlawanan. Masa kolonial terjadi penindasan seperti di bidang pendidikan dan ekonomi, yang kemudian memunculkan gerakan sosial seperti Budi Utomo, Sarikat Dagang Islam, Taman Siswa, Gerakan ekonomi yang dipelopori Bung Hatta dalam wujud koperasi. Fase orde lama menjelaskan bahwa pemberdayaan digunakan sebagai mobilisasi politik dan sosial. Setelah kemerdekaan, pemerintah yang baru berupaya untuk menata kehidupan bernegara. Pemberdayaan digunakan sebagai upaya untuk pembangunan nasional melalui gotong royong, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, dan perkembangan partai politik. Fase orde baru menjelaskan bahwa pemberdayaan digunakan sebagai wujud pembangunan nasional. Program pemberdayaan yang muncul seperti program pembangunan lima tahun, revolusi hijau, pemberdayaan perempuan, dan Program Inpres Desa Tertinggal. Fase reformasi hingga sekarang menjelaskan bahwa pemberdayaan digunakan sebagai alat partisipasi dan demokratisasi. Program pemberdayaan yang berkembang pada masa reformasi hingga sekarang seperti otonomi daerah, penguatan civil society, pemberdayaan di bidang ekonomi seperti UMKM, Bumdes, dan program stimulan ekonomi lainnya, pemberdayaan perempuan, program digitalisasi dan pemanfaatan teknologi.

Perkembangan pemberdayaan pada fase sekarang belum memberikan transformasi sosial yang mewujudkan kedaulatan rakyat, kejayaan negara, dan keutamaan warga. Ketiga hasil penelitian yang diceritakan Tohari memiliki kesimpulan yang menarik yaitu praktik program pemberdayaan yang dijalankan oleh teknokrat bahkan ilmuwan ilmiah tidak banyak mengubah keadaan. (Tohari, 2024). Fakta lain yang mendukung kesimpulan Tohari juga banyak kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kegagalan program PNPM Mandiri yang

berupaya untuk mengentaskan masyarakat miskin, bumdes yang mati suri, program digitalisasi yang membebani desa, dan banyak program pemberdayaan lainnya.

Pemberdayaan yang terjadi mulai dari fase orde baru hingga sekarang teredusir oleh modernisasi. Pemberdayaan dan modernisasi memiliki tujuan yang sama, yaitu transformasi sosial. Kedua konsep memiliki hubungan yang erat. Modernisasi menjadi mesin pendorong dalam proses pemberdayaan. Kemajuan teknologi dan demokratisasi menjadi contoh nyata bagaimana kemudian proses pemberdayaan berjalan. Penyederhanaan menggunakan teknologi atau sering disebut dengan digitalisasi, peningkatan partisipasi dimana individu atau kelompok diberikan wadah untuk partisipasi, menjadi pintu masuk dalam proses pemberdayaan. Hubungan yang erat antara pemberdayaan dan modernisasi seolah-olah memberikan perubahan yang baik tetapi malah tidak memberikan dampak signifikan dalam sebuah perubahan sosial baik dari aspek keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, dan kemandirian. Modernisasi yang mendorong proses pemberdayaan justru menjauhkan dari kitoh pemberdayaan itu sendiri yaitu keberkuasaan, kemandirian, dan kedaulatan. Dengan melihat berbagai fakta pemberdayaan yang kemudian ternyata jauh dari dampak yang diharapkan maka kami tertarik untuk mengkaji ulang konsep pemberdayaan dengan merunut pada pertanyaan penelitian yaitu bagaimana modernisasi mereduksi pengetahuan tentang pemberdayaan? mengapa program pemberdayaan mengalami kegagalan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode kepustakaan atau library research. Library research merupakan suatu metode yang menganalisis referensi-referensi yang berkaitan dengan topik penelitian (Ali, 2020). Kajian Pustaka merupakan bagian yang penting dalam penelitian ilmiah. Kajian pustaka bertujuan untuk mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber referensi. Kajian pustaka mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, dan berbagai sumber lain yang memberikan pemahaman mendalam terhadap isu yang diteliti. Kajian Pustaka membantu peneliti dalam memahami konteks penelitian yang telah ada dan mengidentifikasi kesenjangan yang perlu diisi oleh penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka memiliki fungsi sebagai dasar dalam membangun kerangka konseptual yang mendukung argumentasi penelitian (Creswell, 2014).

Sumber-sumber kajian pustaka terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer yaitu sumber asli seperti buku, jurnal penelitian, laporan ilmiah. Sumber sekunder yaitu

ringkasan atau interpretasi dari sumber primer seperti review artikel, buku teks. Sumber tersier yaitu sumber yang mengindeks atau mengabstraksi sumber primer dan sekunder seperti bibliografi dan database penelitian

Penyusunan kajian pustaka terdiri dari beberapa tahapan yaitu, pertama, mengidentifikasi kata kunci. Peneliti sebelum memulai mencari referensi harus menentukan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, mencari sumber yang relevan, sumber dapat berupa sumber primer, sekunder, dan tersier. Ketiga, menganalisis dan mengevaluasi sumber. Setiap sumber harus di cek dan periksa relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Keempat, mengorganisir literatur, literatur yang sudah dikumpulkan perlu dikelompokkan berdasarkan tema. Kelima, menyusun narasi kajian pustaka, setelah mengumpulkan dan mengorganisir literatur, selanjutnya menuliskan kajian secara sistematis dengan menghubungkan setiap referensi yang digunakan. Keenam, menyusun daftar pustaka

HASIL DAN DISKUSI

Modernisasi dan Reduksi Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan awalnya merupakan respons kritis terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh struktur kekuasaan kolonial, patriarkal, dan kapitalistik. Dalam konteks feminisme global selatan, gerakan seperti DAWN (*Development Alternatives with Women for a New Era*) menekankan pemberdayaan sebagai proses pembebasan kolektif yang tidak dapat dilepaskan dari perjuangan melawan ketimpangan gender, kelas, dan ras. Pemberdayaan adalah bagian dari gerakan sosial yang bersifat politis, memperjuangkan keadilan struktural dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Namun seiring menguatnya arus globalisasi dan neoliberalisme pada dekade 1990-an, istilah pemberdayaan mulai diadopsi oleh lembaga-lembaga donor seperti Bank Dunia dan UNDP. Perubahan ini menandai pergeseran konseptual dari pemberdayaan sebagai proyek politik menjadi strategi teknokratis dengan logika efisiensi dan manajemen proyek. Dalam dokumen-dokumen resmi, pemberdayaan mulai didefinisikan sebagai peningkatan "kapasitas individu untuk membuat pilihan dan mengubahnya menjadi tindakan dan hasil" (Narayan, 2002)

Transformasi ini merupakan bagian dari praktik "rendering technical" (Li, 2007), yaitu proses di mana masalah sosial yang kompleks direduksi menjadi isu teknis yang dapat

diintervensi melalui proyek-program tertentu. Pemberdayaan yang sebelumnya merupakan proyek politik menjadi depolitisasi dan diukur dengan indikator-indikator kuantitatif seperti jumlah pelatihan yang diikuti, jumlah kredit mikro yang diberikan, atau tingkat partisipasi dalam forum lokal. Akibatnya, dimensi struktural pemberdayaan seperti hak atas tanah, akses terhadap kekuasaan, dan keadilan distribusi menjadi terpinggirkan.

Reduksi pemberdayaan dalam kerangka modernisasi juga berdampak pada relasi epistemik antara "pengetahuan ahli" dan "pengetahuan lokal". Modernisasi membawa serta asumsi superioritas pengetahuan Barat (rasional, terukur, dan bersifat universal) atas pengetahuan lokal yang dianggap tradisional, tidak ilmiah, atau tidak efisien. Dalam konteks pembangunan, ini terlihat dalam cara proyek-proyek intervensi mendesain program tanpa dialog bermakna dengan komunitas sasaran. Contohnya, dalam proyek konservasi di Lore Lindu yang diteliti oleh Tania Li (2007), para teknokrat mendefinisikan kawasan konservasi berdasarkan peta dan data satelit, tanpa mempertimbangkan praktik pengelolaan hutan tradisional masyarakat lokal. Ketika masyarakat memprotes relokasi atau pembatasan akses ke hutan, respons dari para perencana yaitu menawarkan pelatihan pertanian dan bantuan benih. Dari langkah-langkah teknis yang ditawarkan tidak menyentuh akar permasalahan, yaitu hilangnya relasi sosial dan spiritual masyarakat terhadap tanah leluhur mereka.

Pengetahuan lokal dalam hal ini bukan hanya dikesampingkan, tetapi juga didelegitimasi. Praktik ini disebut oleh beberapa akademisi sebagai bentuk "epistemic injustice" (Fricker, 2007), di mana komunitas dianggap tidak memiliki kapasitas untuk memahami kebutuhannya sendiri, sehingga harus diberi tahu apa yang baik bagi mereka oleh para ahli dari luar. Dengan demikian, modernisasi tidak hanya melahirkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga ketimpangan epistemik.

Salah satu dampak paling merusak dari reduksi pemberdayaan dalam kerangka modernisasi adalah depolitisasi persoalan pembangunan. Seperti dikemukakan James Ferguson (1994) dalam analisisnya tentang proyek pembangunan di Lesotho, pembangunan sering kali menciptakan "efek antipolitik" dengan menyajikan masalah sosial sebagai defisit teknis yang dapat diselesaikan oleh intervensi birokratik. Pemberdayaan menjadi alat untuk mendisiplinkan masyarakat agar sesuai dengan norma-norma efisiensi, produktivitas, dan kemandirian versi negara atau donor. Masyarakat miskin diubah menjadi wirausahawan kecil yang bertanggung jawab atas kesejahteraannya sendiri, tanpa dukungan struktural yang memadai. Ini

menciptakan bentuk baru paternalisme, di mana negara atau NGO berperan sebagai "penjaga moral" yang menentukan arah kehidupan masyarakat.

Dalam banyak kasus, proyek pemberdayaan bahkan menjadi instrumen kontrol sosial. Masyarakat diminta bersyukur telah "diberdayakan" meskipun tidak memiliki ruang untuk menentukan bentuk pemberdayaan seperti apa yang mereka inginkan. Linda Weidenstedt (2016) menyebut fenomena ini sebagai "paradoks pemberdayaan", di mana transfer kekuasaan secara struktural justru memperkuat relasi subordinasi secara komunikatif. Pemberdayaan menjadi performatif: masyarakat mempraktikkan retorika yang diharapkan donor (tentang kemandirian, kepemimpinan, dll.) demi mendapatkan akses terhadap sumber daya, meskipun nilai-nilai ini bertentangan dengan realitas lokal. Hal ini terlihat dalam studi Ayesha Khurshid (2016), di mana guru perempuan di Pakistan menyuarakan narasi pemberdayaan versi NGO, namun secara simultan meredefinisi pemberdayaan sesuai konteks dan nilai lokal.

Dalam konteks Indonesia, narasi pemberdayaan sering menjadi bagian dari kebijakan populis yang berusaha menjangkau masyarakat miskin secara langsung. Program seperti PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) mengklaim mengedepankan partisipasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Namun berbagai studi menunjukkan bahwa partisipasi tersebut cenderung bersifat seremonial. Sutoro Eko (2014) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, warga hanya terlibat dalam tahap formal seperti musyawarah desa, tetapi keputusan utama tetap ditentukan oleh aparat desa atau konsultan teknis. Bahkan ketika warga terlibat dalam pelaksanaan proyek, mereka cenderung dimobilisasi sebagai tenaga kerja murah, bukan sebagai subjek politik. Negara memainkan peran ganda yaitu di satu sisi memposisikan diri sebagai fasilitator pemberdayaan, namun di sisi lain tetap menjaga struktur kekuasaan yang hierarkis. Alih-alih memberdayakan warga, proyek seperti ini justru memproduksi warga yang patuh, bergantung pada bantuan, dan teralienasi dari ruang politik deliberative.

Mengapa Program Pemberdayaan Gagal?

Kegagalan banyak program pemberdayaan bermula dari cara negara dan lembaga donor memformulasikan tujuan pembangunan. Program sering kali didesain untuk mencapai target jangka pendek, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan akses layanan dasar, atau peningkatan kapasitas individu, tanpa memperhatikan perubahan relasi sosial dan distribusi

kekuasaan yang lebih dalam. Tujuan yang awalnya bersifat struktural direduksi menjadi sasaran-sasaran teknis yang terukur.

Logika proyek yang mendominasi praktik pemberdayaan membuat intervensi hanya berlangsung dalam siklus anggaran, bergantung pada kehadiran fasilitator eksternal, dan didorong oleh indikator keberhasilan kuantitatif seperti jumlah peserta pelatihan, pembangunan infrastruktur, atau jumlah unit ekonomi produktif. Akibatnya, pemberdayaan terlepas dari realitas sosial politik masyarakat dan gagal membentuk basis perubahan jangka panjang.

Meskipun narasi pemberdayaan menekankan pada partisipasi, dalam praktiknya banyak program justru memperkuat dominasi elite lokal, aparat desa, atau pihak ketiga seperti konsultan proyek. Ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat dan aktor-aktor pembangunan membuat suara kelompok marginal jarang didengar. Studi seperti oleh Susan Wong (2012) tentang PNPM Mandiri menunjukkan bahwa musyawarah desa hanya formalitas. Proses pengambilan keputusan sering kali diarahkan oleh aparat atau konsultan. Masyarakat miskin dan perempuan cenderung tidak diberi ruang untuk menyuarakan kebutuhan mereka, atau bahkan tidak diundang dalam forum resmi. Proses rekrutmen kader pemberdayaan dan fasilitator sering kali didasarkan pada kedekatan personal atau loyalitas politik. Hal ini menciptakan praktik eksklusif yang semakin menjauhkan masyarakat dari kontrol atas program. Dalam konteks ini, pemberdayaan gagal menjadi proses demokratis, dan malah menjadi alat reproduksi kekuasaan lama.

Banyak program pemberdayaan fokus pada transfer keterampilan teknis atau bantuan ekonomi, tanpa mengiringinya dengan upaya membangun kesadaran kritis masyarakat atas ketimpangan struktural yang mereka alami. Akibatnya, masyarakat cenderung memahami kemiskinan atau keterpinggiran sebagai akibat dari kurangnya kemampuan individu, bukan sebagai hasil dari struktur sosial yang tidak adil. Tanpa pendekatan emansipatoris, pemberdayaan hanya melahirkan individu yang patuh terhadap sistem, bukan warga kritis yang mampu memperjuangkan perubahan. Paulo Freire menekankan bahwa pendidikan sebagai jalan pemberdayaan harus bersifat dialogis, reflektif, dan membebaskan. Namun dalam praktik proyek, pendekatan seperti ini jarang digunakan karena dianggap tidak efisien atau tidak terukur (Freire, 1970). Ketiadaan kesadaran kritis juga membuat pemberdayaan menjadi rawan kooptasi. Ketika masyarakat tidak memahami akar persoalan struktural, mereka mudah menerima bantuan tanpa mempertanyakan keberlanjutan atau orientasi program. Dalam jangka panjang, ini memperkuat ketergantungan dan membunuh inisiatif kolektif.

Secara paradoks, pemberdayaan sering kali menjadi alat kontrol sosial yang baru. Dalam banyak kasus, program pemberdayaan memproduksi warga yang disiplin, patuh, dan sesuai dengan standar moral serta etika kerja neoliberal: mandiri secara ekonomi, tidak bergantung pada negara, dan produktif secara individual. Pemberdayaan bergeser dari proses kolektif menjadi proyek individualisasi, di mana setiap orang diminta bertanggung jawab atas kesejahteraannya sendiri. Model ini menempatkan kegagalan bukan pada sistem sosial, tetapi pada individu yang dianggap malas, tidak mau belajar, atau kurang berusaha. Kritik terhadap model ini disampaikan oleh berbagai akademisi seperti James Ferguson (1994), Tania Li (2007), dan David Mosse (2005), yang menyoroti bagaimana proyek pembangunan menciptakan efek antipolitik. Alih-alih membuka ruang politik, program justru menutup ruang kontestasi dengan retorika teknis dan moral. Akibatnya, warga tidak lagi melihat proyek pembangunan sebagai arena perjuangan hak, tetapi sebagai mekanisme distribusi bantuan yang harus diterima dengan syukur.

Kegagalan pemberdayaan juga berkaitan dengan lemahnya resistensi masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan yang merugikan. Resistensi yang ada sering kali bersifat reaktif, tidak terorganisir, dan mudah dipatahkan oleh aparat atau elite lokal. Minimnya organisasi rakyat, lemahnya solidaritas antarwarga, dan ketergantungan pada elite membuat masyarakat sulit membangun gerakan kolektif. Sebagian masyarakat mencoba melakukan adaptasi taktis, seperti menyuarakan narasi yang diinginkan oleh proyek atau mengikuti prosedur agar mendapat manfaat. Namun strategi ini hanya memperkuat logika proyek dan melemahkan potensi transformasi. Membangun resistensi yang efektif membutuhkan organisasi rakyat yang kuat, pendidikan politik, dan jejaring solidaritas lintas wilayah. Tanpa itu, pemberdayaan akan terus berada dalam cengkeraman struktur kekuasaan yang ingin dipertahankannya sendiri.

Studi Kasus: Program Pemberdayaan di Indonesia

PNPM Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan proyek andalan pemerintah Indonesia dalam mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Dalam retorikanya, PNPM mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Namun, seperti ditunjukkan oleh berbagai studi (S. Wong, 2012; Eko, 2014), partisipasi ini sering kali bersifat simbolik. Musyawarah desa yang diadakan

sebagai forum perencanaan sering kali hanya menjadi formalitas yang diarahkan oleh fasilitator teknis atau aparat desa. Keputusan mengenai jenis kegiatan, anggaran, dan sasaran intervensi sudah dibentuk sebelumnya melalui kerangka logis proyek yang disusun oleh pihak eksternal. Dalam praktiknya, yang lebih sering terjadi adalah masyarakat mengisi peran sebagai pelaksana atau pekerja proyek, bukan sebagai perancang perubahan sosial.

Dana Desa dan Desentralisasi Terpimpin

Kebijakan Dana Desa yang dimulai sejak 2015 menawarkan harapan baru terhadap penguatan kapasitas desa. Namun di banyak tempat, alokasi Dana Desa tidak lantas mendorong pemberdayaan. Studi-studi lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan dana masih didominasi kepala desa dan perangkatnya, sementara warga biasa, terutama kelompok rentan (perempuan, miskin, difabel), tidak punya posisi tawar dalam musyawarah perencanaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tanpa demokratisasi kelembagaan hanya akan memperkuat elite lokal. Ini juga memperlihatkan bagaimana struktur relasi kuasa lama tetap bertahan dalam format baru. Wacana pemberdayaan yang dibawa negara melalui Dana Desa justru terjebak dalam birokratisasi dan administrasi teknokratik.

Program Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat

Berbagai program konservasi lingkungan di Indonesia, seperti REDD+, taman nasional, atau proyek hutan kemasyarakatan, mengklaim memuat komponen pemberdayaan. Namun dalam praktiknya, program ini sering justru menjadi instrumen perampasan wilayah adat. Pemetaan, zonasi, dan pelarangan akses ke hutan dilakukan atas nama konservasi, tanpa persetujuan bebas dan informasi yang cukup dari masyarakat adat. Tania Li (2007) dalam studinya di Lore Lindu menunjukkan bagaimana proyek pembangunan justru mengalienasi masyarakat dari tanahnya sendiri. Masyarakat diposisikan sebagai penerima bantuan, seperti pelatihan pertanian atau peralatan, tetapi kehilangan kontrol atas sumber daya alam yang menjadi basis kehidupan mereka. Pemberdayaan dalam konteks ini menjadi dalih teknokratik yang menyembunyikan konflik politik atas ruang.

Proyek Perempuan dan Narasi Kewirausahaan

Program pemberdayaan perempuan, baik oleh negara maupun LSM, banyak yang berfokus pada pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha mikro, dan pelibatan dalam

koperasi atau kelompok simpan pinjam. Meskipun tampak inklusif, pendekatan ini sering gagal menyentuh akar ketimpangan gender seperti pembagian kerja domestik, kekerasan rumah tangga, atau subordinasi dalam pengambilan keputusan komunitas. Sebaliknya, narasi yang muncul adalah perempuan yang berdaya adalah mereka yang menjadi wirausahawan mandiri, produktif, dan berkontribusi pada ekonomi keluarga. Narasi ini menciptakan tekanan baru bagi perempuan untuk sukses secara ekonomi, tetapi tidak memberikan ruang untuk membongkar struktur patriarki yang membatasi gerak mereka. Seperti yang dikritik oleh Sholkamy (2010), pemberdayaan model ini mengaburkan kekuasaan sebagai persoalan struktural dan menggantinya dengan etika neoliberal yang menekankan tanggung jawab individu.

Berbagai studi kasus di atas menunjukkan bahwa proyek-proyek pemberdayaan di Indonesia, meskipun beragam bentuk dan skalanya, cenderung mereproduksi logika modernisasi yang depolitisasi. Warga diposisikan sebagai penerima, bukan sebagai subjek politik. Partisipasi dibingkai secara administratif, bukan sebagai arena deliberasi. Pengetahuan lokal dikesampingkan oleh standar teknis proyek. Namun, kasus-kasus resistensi juga muncul. Beberapa komunitas adat memperjuangkan peta partisipatif dan hak atas wilayahnya. Kelompok perempuan di desa membentuk organisasi untuk advokasi hak mereka. Gerakan sosial di daerah tambang menolak skema CSR dan menuntut keadilan ekologis. Pelajaran pentingnya adalah bahwa pemberdayaan tidak bisa dihasilkan dari atas ke bawah. Ia harus dibangun dari **pengalaman kolektif, solidaritas sosial, dan kesadaran kritis** terhadap struktur ketimpangan yang ada. Jika tidak, maka proyek pemberdayaan hanya menjadi wajah baru dari kontrol dan dominasi.

Memahami Konsep Pemberdayaan dengan Pendekatan Genealogi

Fase Pertama: Pemberdayaan sebagai Powerfull Word

Konsep pemberdayaan dapat dipelajari melalui pendekatan genealogi. Konsep pemberdayaan secara genealogi mengalami perjalanan yang panjang dalam sejarah sosial dan politik. Konsep pemberdayaan secara genealogi dapat dibagi menjadi tiga fase yaitu pemberdayaan sebagai powerfull word (fase kesatu), pemberdayaan sebagai buzzword yang disalah gunakan (fase kedua), dan pemberdayaan sebagai powerless word (fase ketiga).

Dalam fase awal genealogi pemberdayaan, istilah “pemberdayaan” berfungsi sebagai kata yang menggugat: ia memobilisasi pengalaman tertindas, menamai ketimpangan, dan mengajak kolektif untuk menantang struktur kuasa. Secara teoritik, jejaknya dekat dengan

pembacaan genealogis ala Foucault yaitu kuasa tidak sekadar menindas dari atas, tetapi bekerja melalui wacana, pengetahuan, dan praktik keseharian; karena itu, pemberdayaan yang “powerful” adalah kontra-wacana yang mengubah subjek dari objek dominasi menjadi agen yang mengetahui dan bertindak (Adams, 2022).

Pemberdayaan di ranah gerakan perempuan tampil sebagai resistensi politis terhadap patriarki dan eksklusi demokratis. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa aktivisme feminis menjadi “penyangga demokrasi,” menegaskan hak, inklusi, dan partisipasi setara sekaligus melawan kemunduran hak perempuan di banyak negara (Choi, 2024). Di Indonesia, tinjauan sistematis juga menegaskan peran kepemimpinan perempuan dalam menggerakkan perubahan struktural melalui strategi wacana, jejaring, dan aksi kolektif (Aulia, 2024). Narasi-narasi ini memosisikan “empowerment” bukan sekadar peningkatan kapasitas individu, melainkan praktik resistensi yang menantang struktur kuasa gender dan politik. (Choi, 2024; Aulia, 2024).

Swai dalam buku yang ditulis dengan judul “*Beyond Women’s Empowerment in Africa*” membahas pengalaman hidup perempuan di Tanzania, khususnya bagaimana kehidupan mereka dibentuk oleh proses sosial, budaya, politik, dan sejarah. Swai menekankan bahwa pengetahuan perempuan bersifat beragam, politis, dan sering kali tidak diakui oleh sistem pendidikan atau pembangunan arus utama. Melalui pengamatan dan wawancara, ia menemukan bahwa perempuan kerap menghadapi penghapusan pengetahuan serta aktivitas mereka, namun tetap berupaya menegosiasikan ruang untuk eksistensi dan perannya.

Pendekatan “pemberdayaan perempuan” yang umum digunakan pembangunan sering kali hanya menempatkan perempuan sebagai tenaga kerja tambahan, tanpa benar-benar mengubah relasi gender. Swai berpendapat, pemberdayaan sejati harus melampaui sekadar memberi sertifikat atau pekerjaan; harus membantu perempuan memahami, mempertanyakan, dan mengubah struktur kekuasaan yang menindas. Dalam banyak program pembangunan, perempuan di mobilisasi untuk berpartisipasi tetapi tidak diberikan pengakuan yang setara atas kontribusinya. Akibatnya, mereka mengalami “dislokasi” atau keterasingan dari identitas dan sumber pengetahuan mereka sendiri.

Salah satu temuan menarik adalah konsep “keperempuanan” yang digambarkan Swai sebagai proses ketika perempuan dipisahkan dari pengetahuan dan aktivitas yang menjadi kekuatan mereka. Ia mencontohkan penggunaan *khanga* (kain bermotif dengan pesan) sebagai media komunikasi, pembelajaran, dan pembentukan identitas. Meskipun sederhana, *khanga*

menjadi alat penting bagi perempuan untuk menyampaikan pandangan, membangun jaringan solidaritas, dan mempertahankan pengetahuan.

Swai menekankan bahwa memahami sistem pengetahuan perempuan bukan soal membandingkan dengan laki-laki, tetapi mengakui bahwa perempuan adalah pencipta pengetahuan yang berharga. Ia juga mengkritisi “akal sehat” sosial, seperti pandangan bahwa pernikahan adalah kewajiban perempuan, yang sering kali bertentangan dengan keinginan dan kepentingan pribadi mereka. Swai menyimpulkan bahwa pemberdayaan harus memandang masalah perempuan sebagai isu politik, nasional, dan global. Gerakan perempuan dan solidaritas kolektif menjadi kunci untuk mempertahankan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan ruang hidup mereka. Swai juga mendorong strategi pendidikan yang kritis dan berbasis pada realitas sehari-hari perempuan, sehingga pengetahuan mereka dapat diakui, dipelihara, dan diwariskan.

Pada konteks sumber daya alam, pemberdayaan komunitas lokal berfungsi mematahkan hegemoni ekstraktivisme. Studi sosiologi tahun 2024 mendokumentasikan bagaimana komunitas sekitar tambang di Indonesia melakukan perlawanan atas praktik perusahaan yang dianggap merusak lingkungan dan merampas tanah adat; resistensi itu memanfaatkan klaim hak, mobilisasi sosial, dan wacana keadilan ekologis (Muhammad, 2024). Di banyak kasus, “pemberdayaan” hadir sebagai bahasa politik komunitas—mencipta ruang partisipasi, menekan perusahaan dan pemerintah, serta menegosiasikan ulang relasi kuasa dalam proyek pertambangan (Muhammad, 2024; Zanini, 2023). (Muhammad, 2024; Zanini, 2023).

Benang merah dari contoh-contoh ini: pemberdayaan yang “powerfull” bukan sekadar program teknokratis, melainkan praktik politis yang menamai relasi kuasa, memproduksi pengetahuan tandingan, dan mengorganisasi aksi kolektif. Dengan lensa genealogi, kita melihat “empowerment” lahir dan bekerja dalam jaringan kuasa yang dimaknai sebagai bentuk menggeser, merundingkan, dan sesekali membongkar struktur yang menindas (Adams, 2022; Haugaard, 2022). (Adams, 2022; Haugaard, 2022).

Fase Kedua: Pemberdayaan sebagai buzzword yang disalahgunakan

Dalam perjalanan sejarahnya, “pemberdayaan” awalnya adalah bahasa perlawanan (fase pertama). Namun ketika konsep ini masuk ke ranah kebijakan pemerintah, lembaga donor

internasional, dan program pembangunan, maknanya bergeser. Ia berubah menjadi **buzzword** kata yang sering digunakan karena terdengar positif, modern, dan inklusif, tetapi sering kali kosong dari makna kritis yang dulu dimilikinya atau menjadi label proyek.

Istilah ini dipakai untuk memberi legitimasi pada berbagai program, mulai dari proyek pembangunan desa, pemberdayaan perempuan, hingga partisipasi publik digital. Namun, yang sering terjadi adalah pergeseran fokus dari perubahan struktural menuju pencapaian target teknis jangka pendek yang bisa diukur.

Karakteristik Pemberdayaan sebagai Buzzword berdasarkan kajian literatur, ada beberapa ciri pemberdayaan yaitu kesatu, teknokratisasi, pemberdayaan diukur melalui indikator kuantitatif dan format laporan yang di standarisasi. Contohnya, penelitian Smith (2023) menemukan bahwa *Women's Empowerment in Agriculture Index (WEAI)* banyak digunakan oleh lembaga donor seperti CARE dan Gates Foundation untuk menilai “kemajuan” pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. Namun, indikator yang dipakai berakar pada nilai dan kerangka Barat seperti kepemilikan aset, partisipasi dalam pasar, dan kemandirian ekonomi yang belum tentu mencerminkan makna pemberdayaan dalam konteks lokal Afrika atau Asia (Smith, 2023). Akibatnya, pemberdayaan dipersempit menjadi kemampuan berpartisipasi dalam ekonomi pasar, bukan sebagai upaya menantang ketidakadilan struktural.

Kedua, dekontekstualisasi, pemberdayaan dipisahkan dari konteks sosial-politik lokalnya. Ia menjadi template yang bisa ditempelkan di mana saja tanpa mempertimbangkan sejarah, budaya, atau konflik kuasa setempat. Misalnya, pendekatan digitalisasi partisipasi publik yang diteliti oleh Gonçalves dkk. (2024) menunjukkan bahwa pemerintah kota mengadopsi sistem partisipasi daring, tetapi praktiknya hanya bersifat tokenistik untuk memenuhi kewajiban prosedural tanpa benar-benar memberi ruang warga untuk memengaruhi kebijakan. Dalam situasi seperti ini, “pemberdayaan” hanya menjadi *checklist* partisipasi.

Ketiga, kooptasi oleh agenda pembangunan, banyak proyek pembangunan yang kemudian konsep pemberdayaan digunakan sebagai alat untuk menguatkan narasi pembangunan neoliberal. Alih-alih mendorong redistribusi kuasa, konsep ini diarahkan untuk menyesuaikan masyarakat dengan logika pasar dan pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan menjadi sarana untuk memastikan kelancaran implementasi program pembangunan, bukan untuk menantang paradigma pembangunan itu sendiri.

Dalam kerangka genealogi, fase ini mencerminkan disiplinisasi wacana pemberdayaan. Pemberdayaan tidak lagi menjadi konsep yang mengganggu tatanan kekuasaan, tetapi justru membantu mempertahankannya. Bahasa pemberdayaan dimasukkan ke dalam sistem evaluasi, indikator pembangunan, dan laporan keberhasilan proyek, sehingga mengamankan legitimasi kekuasaan yang ada. Kuasa tidak lagi dihadapi secara frontal, melainkan diinternalisasi melalui norma “kemajuan” dan “efisiensi” yang ditetapkan oleh aktor pembangunan.

Pemberdayaan pada fase ini ibarat kata manis yang kehilangan rasa asli. Pemberdayaan sering dipakai untuk menunjukkan komitmen pada keadilan sosial, tetapi dalam praktiknya justru mengaburkan tujuan transformatif yang dulu menjadi ruhanya. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memulihkan kembali makna kritis pemberdayaan agar tidak sekadar menjadi ornamen kebijakan.

Fase Ketiga: Pemberdayaan sebagai powerless word

Pada fase pertama “pemberdayaan” adalah bahasa perlawanan dan pada fase kedua menjadi buzzword teknokratis, maka pada fase ketiga istilah ini mengalami degradasi makna yang lebih jauh. Pemberdayaan menjadi kosakata serba guna yang dapat ditempelkan pada hampir semua aktivitas mulai dari program pemerintah, kampanye sosial, hingga iklan produk kecantikan, namun tidak lagi membawa daya transformasi atau makna politik yang mendalam.

Dengan kata lain, pemberdayaan pada fase ini tidak berbahaya bagi kekuasaan, tidak menantang status quo, dan justru sering digunakan untuk mendukung sistem yang ada.

Pada fase ketiga ini, “pemberdayaan” menjadi istilah yang semakin kehilangan kekuatan, sebuah kata yang terdengar positif, tetapi sering kali kosong makna, tidak berdaya untuk memicu perubahan struktural. Istilah ini digunakan secara luas, bahkan secara banal, sehingga tidak lagi mencerminkan tindakan atau transformasi nyata.

Mengapa Pemberdayaan Bisa Jadi "Powerless Word"? Beberapa jawaban yang bisa mendasari yaitu seperti dikritik dalam artikel *The Guardian* (2016), istilah “empowerment” telah dipakai untuk berbagai hal sepele mulai dari belanja hingga selfie yang menghasilkan istilah itu sebagai *catch-all* yang kehilangan akar politis dan kolektifnya. Pemberdayaan mengandung prasangka paternalistik. Artikel dari SIRA (2023) menyoroti bahwa istilah itu

menyiratkan bahwa kekuasaan diberikan oleh yang kuat kepada yang lemah, memperlihatkan bahwa subjek yang “diberdayakan” dianggap tidak memiliki kekuatan sendiri.

Dalam kritik media, “pemberdayaan” telah disalahgunakan sebagai alat pemasaran: misalnya, iklan produk kecantikan atau fesyen yang menggunakan jargon “empowerment” untuk menjual produk. Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan telah menjadi kata yang dibajak oleh konsumerisme, bukan alat perubahan sosial.

Selain itu konsep pemberdayaan yang menyamar sebagai bantuan Najjar (2023, SIRA) menyatakan bahwa kata “empowerment” sering menggambarkan suasana di mana kekuasaan diberikan kepada mereka yang dianggap “tidak punya kekuasaan.” Ini memberikan kesan bahwa subjek tidak mandiri dan memerlukan bantuan eksternal, padahal sebenarnya, mereka memiliki potensi untuk mengambil kembali kekuasaan mereka sendiri jika mendapat ruang yang tepat.

Pemberdayaan dalam fase ini berubah menjadi "powerless word": sebuah istilah yang dipakai sembarangan, kehilangan kedalaman, dan seringkali memperkuat narasi yang sebenarnya tidak memicu perlawanan atau transformasi struktural. Istilah itu jadi hampa lebih sebagai jargon simbolik, bukan alat kritis. Pemberdayaan adalah kata yang nyaman diucapkan, tetapi tidak mengguncang. Pemberdayaan aman bagi kekuasaan dan mudah dipakai untuk tujuan estetis, branding, atau retorika kebijakan.

Refleksi Konsep Pemberdayaan

Reproduksi Konsep: Dimensi Politik dalam Pemberdayaan

Pemberdayaan tidak dapat direduksi menjadi pelatihan teknis, bantuan modal, atau keikutsertaan dalam forum administratif. Esensi pemberdayaan adalah pembebasan dari relasi kuasa yang menindas, dan itu tidak dapat dicapai tanpa memulihkan dimensi politiknya. Ini berarti mengakui bahwa kemiskinan, subordinasi, dan ketimpangan adalah persoalan struktural yang harus diperjuangkan secara kolektif. Memulihkan dimensi politik juga berarti membangun ruang deliberatif yang memungkinkan warga berdialog, berkonflik secara sehat, dan mengambil keputusan bersama. Ruang ini harus dimaknai sebagai arena produksi makna, bukan sekadar forum formalitas. Di sinilah peran pendidikan kritis sangat penting—untuk membangkitkan kesadaran akan struktur dan kemampuan beraksi bersama.

Rekognisi Pengetahuan Lokal

Langkah penting lainnya adalah pengakuan terhadap keberagaman pengetahuan lokal. Pengetahuan komunitas bukanlah hal yang ketinggalan zaman, tetapi hasil historis dari adaptasi, refleksi, dan kreativitas yang diwariskan lintas generasi. Dalam konteks krisis iklim dan degradasi ekologis, pengetahuan lokal sering kali menyediakan alternatif yang lebih berkelanjutan dibanding pendekatan teknokratis. Pemberdayaan harus membuka ruang dialog epistemik antara pakar dan warga. Proyek yang berhasil adalah proyek yang dimiliki bersama, tidak didesain dari luar lalu dipaksakan ke dalam. Kolaborasi sejati membutuhkan relasi yang setara, penghargaan terhadap bahasa lokal, dan kesabaran dalam mendengarkan.

Pemberdayaan sebagai Proses Kolektif

Pemberdayaan harus dipahami sebagai proses yang kolektif. Dalam banyak pengalaman global selatan, kekuatan perubahan datang dari komunitas yang terorganisir, saling belajar, dan bergerak bersama. Inisiatif seperti koperasi perempuan, kelompok tani organik, atau organisasi warga kota adalah contoh nyata bagaimana solidaritas bisa menjadi basis kekuatan sosial. Pemberdayaan kolektif bukan hanya soal keberhasilan proyek, tapi tentang membangun relasi sosial baru yang lebih setara. Pemberdayaan yang diharapkan tentu menuntut waktu, konsistensi, dan investasi jangka panjang dimana menjadi hal yang jarang diakomodasi oleh logika proyek pembangunan.

Banyak proyek pemberdayaan gagal karena hubungan antara pemberi bantuan dan masyarakat dipenuhi oleh ketimpangan. Fasilitator sering datang dengan asumsi superioritas moral dan teknis. Padahal, untuk benar-benar memberdayakan, diperlukan relasi yang etis: mendengarkan, meragukan asumsi sendiri, dan membuka ruang bagi perubahan dua arah. Prinsip keadilan dalam relasi berarti juga membuka peluang agar masyarakat menjadi pelaku yang setara dalam menentukan arah, isi, dan cara proyek dijalankan. Ini membutuhkan perubahan institusional dari lembaga-lembaga pembangunan agar tidak sekadar menjadi perantara donor, tetapi menjadi mitra transformatif komunitas.

KESIMPULAN

Pemberdayaan telah mengalami transformasi makna yang signifikan sejak pertama kali diperkenalkan dalam gerakan sosial dan feminis radikal. Awalnya dimaksudkan sebagai proses emansipatoris, pemberdayaan kemudian direduksi oleh logika modernisasi dan pembangunan

menjadi proyek teknokratis yang lebih menekankan indikator, output, dan partisipasi semu daripada perubahan relasi kekuasaan yang nyata.

Melalui pembahasan dengan menggunakan beberapa literatur terutama karya Tania Li, terlihat jelas bahwa modernisasi tidak hanya mengaburkan dimensi politik pemberdayaan, tetapi juga menciptakan struktur epistemik dan praktik pembangunan yang paternalistik, antipolitik, dan ahistoris. Konsep-konsep seperti "rendering technical", "antipolitik", dan "responsibilisasi individu" menjadi mekanisme kunci yang menjebak pemberdayaan dalam kerangka pembangunan depolitisasi.

Studi kasus Indonesia memperlihatkan bagaimana berbagai program seperti PNPM Mandiri, Dana Desa, atau proyek konservasi yang diklaim memberdayakan masyarakat justru mereproduksi struktur kuasa lama, menyingkirkan pengetahuan lokal, dan membatasi ruang partisipasi warga. Program-program tersebut gagal karena tidak mengakui kompleksitas sosial dan struktur ketimpangan yang melatarbelakangi kondisi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S. S., Marzuki, Suyato, & Arpanudin, I. (2024). Women in gender equality movement: A systematic literature review. *Frontiers in Sociology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1432383>
- Choi, S. (2024). Feminist resistance as a bulwark for democracy. *International Feminist Journal of Politics*, 26(4), 739–743. <https://doi.org/10.1080/14616742.2024.2384266>
- Ferguson, J. (1994). *The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. University of Minnesota Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- Fricker, M. (2007). *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford University Press.
- Gonçalves, S., Krenjova, J., & Mendonça, R. F. (2024). Digital participation and political voice: How institutions shape online engagement. *Frontiers in Political Science*, 6. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.11558244>
- Khurshid, A. (2016). *Gender, Religion, and Development in Rural Pakistan: Rural Women's Educational Experiences*. Palgrave Macmillan.
- Li, T. M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press.

- Lopez, M., & DeLuca, K. M. (2023). #Empowerment or #SelfBranding? The commodification of feminist politics on social media. *Feminist Media Studies*. <https://doi.org/10.1080/14680777.2023>.
- Masduki. (2025). Digital activism for press freedom advocacy in post-authoritarian Indonesia. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 6(3), 101. <https://doi.org/10.3390/jcp6030101>
- Mosse, D. (2005). *Cultivating Development: An Ethnography of Aid Policy and Practice*. Pluto Press.
- Muhammad, S., Arifin, S., Syam, R., & Putra, B. A. (2024). On the brink of social resistance: Local community perceptions of mining company operating permits in East Luwu, Indonesia. *Frontiers in Sociology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1373736>
- Najjar, Z. M. (2023). "3 Reasons Why We're Dumping the Term Empowerment." SIRA Network
- Narayan, D. (Ed.). (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. World Bank.
- Putra, B. A. (2024). Digital activism in Southeast Asia: The #MilkTeaAlliance and prospects for social resistance. *Frontiers in Sociology*. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1478630>
- Sholkamy, H. (2010). "Power, Politics and Development in the Middle East." In Cornwall, A., & Eade, D. (Eds.), *Deconstructing Development Discourse: Buzzwords and Fuzzwords*. Practical Action Publishing.
- Smith, S. R. (2023). *Rethinking women's empowerment in development: A critical analysis of measurement and meaning in global agriculture*. [Doctoral dissertation, University of Leeds]. White Rose eTheses Online. <https://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/33506>
- The Guardian. (2016, April 19). From shopping to naked selfies: How 'empowerment' lost its meaning. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2016/apr/19/from-shopping-to-naked-selfies-how-empowerment-lost-its-meaning-feminism>
- Vredenburg, J., Kapitan, S., Spry, A., & Kemper, J. A. (2023). Woke washing: Brand activism or corporate hypocrisy? *Journal of Public Policy & Marketing*, 42(1), 7–25. <https://doi.org/10.1177/07439156221108357>
- Weidenstedt, L. (2016). "Empowerment as Ceremony – A Critical Discourse Analysis of the Swedish Strategy for Development Cooperation." *Forum for Development Studies*, 43(1), 73–95.
- Wong, S. (2012). *What Have Been the Impacts of World Bank Community-Driven Development Programs? CDD Impact Evaluation Review and Operational and Research Implications*. The World Bank.